



Research Article

Isu-Isu Kebijakan Pendidikan dan Pengaruh Politik

Ahmad Arif Billah¹, Fatihul Fauzi², Masduki Duryat³

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
E-mail: arhiefbillah27@gmail.com 
2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
E-mail: fatihulfauzi@gmail.com
3. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
E-mail: masduki@uinssc.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 12, 2026
Accepted : July 13, 2026

Revised : June 14, 2026
Available online : August 18, 2026

How to Cite: Ahmad Arif Billah, Fatihul Fauzi and Masduki Duryat. (2026) "Education Policy Issues and Political Influence", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 2150-2157. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.2261.

Education Policy Issues and Political Influence

Abstract. This article discusses issues of education policy that are always important topics of discussion in the dynamics of a country's development. Education is never free from political intervention, because education is a vital instrument in shaping human resources and the direction of the nation's future. This article discusses in depth issues of education policy in Indonesia and the influence of politics in its formation, both in terms of ideology, policy implementation, and curriculum revisions that often depend on the ruling political climate.

Keywords: Education Policy, Education Issues, Education Politics

Abstrak. Artikel ini membahas tentang isu-isu kebijakan Pendidikan yang senantiasa menjadi topik diskusi penting dalam dinamika pembangunan sebuah negara. Pendidikan tidak pernah lepas dari intervensi politik, sebab pendidikan adalah instrumen vital dalam membentuk sumber daya manusia dan arah masa depan bangsa. Artikel ini membahas secara mendalam isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia dan pengaruh politik dalam pembentukannya, baik dari segi ideologis, implementasi kebijakan, hingga revisi kurikulum yang kerap bergantung pada iklim politik yang berkuasa.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Isu Pendidikan, Politik Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Sebagai sebuah sistem sosial, pendidikan tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berada dalam lingkup interaksi yang kompleks dengan kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Peran kekuasaan politik dalam pembentukan sistem pendidikan bukanlah hal yang baru, melainkan bagian inheren dari sejarah perkembangan pendidikan di berbagai negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Definisi tersebut menegaskan posisi pendidikan sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter individu dan mewujudkan cita-cita kolektif bangsa. Namun, dalam praktiknya, pendidikan sering kali menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan publik dan kepentingan politik. Sejalan dengan teori yang diungkap oleh Apple (2004) dalam "Ideology and Curriculum", pendidikan tidaklah netral, melainkan merupakan alat yang digunakan oleh kelompok dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Melalui kebijakan pendidikan, penguasa memiliki kontrol terhadap nilai, ideologi, dan identitas generasi muda.

Menurut Ball (1994) dalam bukunya "Education Reform: A Critical and Post-structural Approach", kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan yang terjadi di dalam struktur sosial, karena kebijakan merupakan hasil negosiasi antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis. Oleh karena itu, sering kali kebijakan pendidikan tidak murni berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, melainkan justru menjadi alat reproduksi sosial yang memihak kepada kelas dominan.

Sementara itu, Freire (1970) dalam "Pedagogy of the Oppressed" menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi sarana domestikasi yang membelenggu kebebasan berpikir peserta didik, melainkan harus mampu membebaskan mereka dari ketidakadilan sosial. Namun, dalam banyak kasus di negara berkembang, kebijakan pendidikan justru dikendalikan oleh elite politik untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, selalu berkaitan erat dengan konfigurasi politik yang sedang berkuasa. Misalnya, perubahan kurikulum yang kerap terjadi hampir setiap pergantian presiden menunjukkan adanya ketergantungan sistem pendidikan terhadap dinamika politik nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahyudi (2017) dalam "Politik Pendidikan di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis", kebijakan pendidikan di Indonesia kerap dipolitisasi untuk memenuhi agenda ideologis maupun kepentingan ekonomi penguasa.

Dengan demikian, pendidikan sebagai sistem sosial yang idealnya bersifat netral dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, dalam kenyataannya tidak pernah benar-benar steril dari kepentingan politik. Sebaliknya, pendidikan justru menjadi ruang reproduksi ideologi dan instrumen pelanggaran kekuasaan politik di berbagai level.

PEMBAHASAN

Hakikat Kebijakan Pendidikan

Isu kebijakan pendidikan tidak hanya sebatas pada perumusan aturan-aturan formal tentang tata kelola sistem pendidikan, melainkan juga mencakup pengaruh ideologis, sosial, dan ekonomi yang menyertainya. Kebijakan pendidikan merupakan cerminan dari cara sebuah negara memandang masa depannya, terutama dalam hal pembentukan karakter warganya dan pemenuhan hak atas pendidikan. Menurut Noeng Muhadjir (1993:15), kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah sosial dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan.

Monahan dan Hengst dalam Syafaruddin (2008:75) menegaskan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah pola-pola pengambilan keputusan yang diterima dan diakui oleh suatu lembaga atau pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kebijakan bukanlah sebuah keputusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah proses panjang, melibatkan aktor-aktor pengambil keputusan, nilai-nilai yang mereka anut, serta situasi sosial politik di sekitarnya.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan tidak dapat dilepaskan dari teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (2013), yang mendefinisikan kebijakan sebagai "whatever governments choose to do or not to do". Dalam artian ini, kebijakan pendidikan mencakup keputusan-keputusan aktif maupun pasif pemerintah dalam merespons kebutuhan pendidikan masyarakat.

Arif Rohman (2009:108) memperjelas bahwa kebijakan pendidikan mencakup proses pengaturan, pendistribusian, dan pengalokasian sumber daya pendidikan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat oleh Nugroho (2011) yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian integral dari kebijakan publik, di mana penyusunannya tidak pernah bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Isu dalam kebijakan pendidikan mengacu pada permasalahan yang muncul dalam proses perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan pendidikan. Menurut Hainsworth & Meng, isu merupakan konsekuensi dari suatu tindakan atau kebijakan yang belum menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memerlukan

perhatian dari pemangku kepentingan untuk menghindari krisis.

Barry Jones & Chase menambahkan bahwa isu kebijakan pendidikan mencerminkan kesenjangan antara harapan masyarakat akan kualitas pendidikan dan realitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, maka isu tersebut dapat berkembang menjadi persoalan kebijakan yang kompleks dan berdampak luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, isu kebijakan pendidikan tidak hanya mengacu pada perubahan regulasi atau peraturan, tetapi juga pada upaya negara dalam menjamin keadilan akses, mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas sistem pendidikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Tilaar (2003), pendidikan merupakan arena kontestasi antara berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang berperan dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pendidikan.

Politik sebagai Penentu Arah Kebijakan Pendidikan

Politik merupakan faktor dominan dalam penentuan arah kebijakan pendidikan. Seperti ditegaskan oleh Nir dan Kafle (2013), stabilitas politik sebuah negara sangat memengaruhi tingkat kelangsungan dan kualitas kebijakan pendidikan, bahkan dalam beberapa kasus memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan kondisi ekonomi negara itu sendiri. Politik, dalam hal ini, menentukan prioritas kebijakan, pengalokasian anggaran, penetapan standar kurikulum, hingga pengangkatan pejabat pendidikan.

Pengaruh politik dalam sistem pendidikan nasional merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dipisahkan, karena pendidikan sebagai produk sosial selalu terikat dengan konteks kekuasaan. Kebijakan pendidikan di Indonesia tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan berproses melalui interaksi antara aktor politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Menurut Ball (1994), setiap kebijakan pendidikan adalah hasil dari kompromi politik, di mana kelompok dominan cenderung mengarahkan kebijakan demi melegitimasi posisi mereka dalam struktur kekuasaan.

Dalam kenyataannya, stabilitas politik menjadi syarat penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan sistem pendidikan. Hal ini diperjelas oleh Nir dan Kafle (2013), yang menyatakan bahwa stabilitas politik berperan lebih penting daripada kondisi ekonomi negara dalam memengaruhi kualitas pendidikan publik. Negara-negara yang memiliki tingkat stabilitas politik tinggi cenderung mampu merumuskan kebijakan pendidikan jangka panjang yang konsisten, sedangkan ketidakstabilan politik menghasilkan kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan.

Wales et al. (2016) menambahkan bahwa perubahan politik sering kali menciptakan ruang bagi reformasi pendidikan, namun pada saat yang sama juga menciptakan tantangan dalam kesinambungan implementasi kebijakan. Misalnya, dalam sejarah pendidikan di Indonesia, perubahan kurikulum kerap terjadi bersamaan dengan pergantian kekuasaan pemerintahan. Dari Kurikulum 1947 (Leer Plan), 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai), 1975, 1984, 1994, KBK 2004, KTSP 2006, hingga Kurikulum 2013, semua transformasi kurikulum tersebut tidak terlepas dari konfigurasi politik yang sedang berkuasa pada masanya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Maryanto dkk. (2017), revitalisasi kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi

juga oleh proses politik yang terjadi dalam negeri. Para pembuat kebijakan pendidikan sering kali mengadopsi pendekatan "top-down" yang sarat muatan politik tanpa terlebih dahulu melibatkan guru, sekolah, dan masyarakat dalam proses penyusunan kurikulum.

Lebih jauh, Ijaduola et al. (2012) dalam studinya mengenai pendidikan di Nigeria, menyoroti hubungan simbiotik antara kebijakan pendidikan dan politik, di mana partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat mengatasi ketimpangan sosial. Namun kenyataannya, dalam banyak negara berkembang termasuk Indonesia, kebijakan pendidikan sering kali digunakan oleh penguasa sebagai instrumen politik untuk memperkuat posisi mereka di hadapan publik, alih-alih semata-mata untuk mendorong pemerataan pendidikan.

Dalam sistem demokrasi, janji politik dalam kampanye pemilu mengenai pendidikan sering menjadi alat untuk menarik simpati rakyat. Mulai dari janji pendidikan gratis, beasiswa, hingga pengangkatan tenaga pengajar, semua itu kerap menjadi alat propaganda politik. Akan tetapi, realisasi dari janji tersebut sering kali tidak sejalan dengan implementasinya pasca pemilu, sebagaimana dikritik oleh Masduki Duryat dalam penelitiannya mengenai isu-isu kebijakan pendidikan.

Isu-Isu Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Pendidikan, sebagai salah satu komponen strategis pembangunan, selalu berada dalam posisi yang sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi politik dan kebijakan penguasa. Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan, kerap kali terjadi tarik-menarik kepentingan antara aspirasi masyarakat, kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dominasi kepentingan politik jangka pendek. Menurut Tilaar (2003), kebijakan pendidikan di Indonesia adalah ruang diskursif di mana kekuasaan politik bernegosiasi dan mewujudkan legitimasi.

1. Kompleksitas Kurikulum

Permasalahan kompleksitas kurikulum bukan hanya sebatas jumlah materi, melainkan juga ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kapasitas peserta didik dan realitas kebutuhan sosial. Darling-Hammond (2010) menegaskan bahwa kurikulum yang efektif seharusnya mendasarkan diri pada keterpaduan antara teori dan praktik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, bukan sekadar akumulasi informasi untuk kepentingan ujian. Di Indonesia, tekanan untuk menuntaskan seluruh materi dalam waktu terbatas sering kali justru memaksa guru dan siswa melakukan proses pembelajaran yang bersifat hafalan (*rote learning*) tanpa pengembangan daya kritis.

2. Pergantian Kurikulum yang terlalu Cepat

Selain kompleksitas materi, sistem pendidikan Indonesia juga dihadapkan pada persoalan perubahan kurikulum yang terlampau cepat. Bransford et al. (2000) dalam "How People Learn" menegaskan bahwa reformasi kurikulum seharusnya bersifat adaptif terhadap riset pembelajaran dan perkembangan ilmu, bukan reaktif terhadap perubahan kebijakan politik. Perubahan kurikulum tanpa perencanaan matang hanya akan menghasilkan kebingungan dan penyesuaian yang setengah matang di tingkat

implementasi, terutama bagi guru dan sekolah.

3. Kualitas Guru

Guru memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Darling-Hammond & Lieberman (2012), kualitas guru merupakan indikator kunci dalam sistem pendidikan yang berdaya saing global. Program sertifikasi yang diterapkan di Indonesia seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan mutu yang nyata karena fokusnya lebih kepada administratif dan finansial dibanding pengembangan profesionalisme sejati (OECD, 2018).

4. Pendanaan Pendidikan

Dalam banyak studi kebijakan, disebutkan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada keberlanjutan dan proporsionalitas pendanaan (UNESCO, 2015). Di Indonesia, meskipun secara konstitusional anggaran pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, implementasinya masih bermasalah karena proporsi terbesar dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk belanja pegawai, bukan pengembangan kualitas sistem pendidikan. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara sekolah di daerah perkotaan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

5. Kurikulum sebagai Media Politik

Kurikulum sebagai instrumen politik telah diakui oleh banyak ahli sebagai salah satu alat untuk reproduksi ideologi penguasa. Menurut Apple (2004), kurikulum bukan hanya pedoman teknis pembelajaran, melainkan juga alat ideologis dalam membentuk pola pikir warga negara. Studi Hamid Hasan (2013) tentang perubahan kurikulum di Indonesia juga menegaskan bahwa penggantian kurikulum seringkali bukan didasarkan pada analisis kebutuhan pendidikan nasional, melainkan pada hasrat politik penguasa untuk menegaskan identitas atau legitimasi pemerintahan.

Dengan demikian, isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia mencerminkan betapa kompleks dan sarat kepentingannya sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang seharusnya bersifat visioner, berjangka panjang, dan berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, kerap kali justru terjebak dalam politik praktis yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mencapai legitimasi kekuasaan, bukan pengembangan kualitas manusia seutuhnya.

KESIMPULAN

Dalam mengonseptualisasikan pembahasan tentang isu-isu Pendidikan kebijakan politik, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah hasil interaksi antara faktor ideologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara. Kebijakan ini mencerminkan bagaimana suatu negara memandang masa depannya, terutama dalam pembentukan karakter warganya dan pemenuhan hak atas pendidikan. Politik memegang peran dominan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, dengan stabilitas politik menjadi kunci keberlanjutan dan kualitas kebijakan tersebut. Di Indonesia, isu-isu kebijakan pendidikan, seperti kompleksitas kurikulum, perubahan kurikulum yang cepat, kualitas guru, pendanaan pendidikan, dan penggunaan kurikulum sebagai alat politik, menunjukkan bahwa pendidikan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan praktis penguasa. Kebijakan pendidikan seharusnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik dan

pengembangan kualitas manusia, namun kenyataannya sering terjebak dalam politik kekuasaan yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum* (3rd ed.). RoutledgeFalmer.
- Arif, R. (2009). *Kebijakan pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ball, S. J. (1994). *Education reform: A critical and post-structural approach*. Buckingham: Open University Press.
- Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2000). *How people learn: Brain, mind, experience, and school*. Washington, D.C.: National Academy Press.
- Darling-Hammond, L. (2010). *The flat world and education: How America's commitment to equity will determine our future*. Teachers College Press.
- Darling-Hammond, L., & Lieberman, A. (2012). *Teacher learning and the acquisition of professional knowledge: An examination of research on contemporary professional development*. Review of Research in Education, 36(1), 125-168.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- Hainsworth, P., & Meng, L. (n.d.). *Isu kebijakan pendidikan*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Hasan, H. (2013). *Perubahan kurikulum dan ideologi pendidikan: Studi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Ijaduola, T. A., Adeyemi, K. A., & Ajayi, A. O. (2012). *Education and politics in Nigeria: An analysis of the dynamics*. International Journal of Education Policy & Leadership, 7(2), 32-42.
- Jones, B., & Chase, S. (n.d.). *Isu kebijakan pendidikan di dunia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Masduki, D. (n.d.). *Isu-isu kebijakan pendidikan: Kritik terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia*.
- Maryanto, S., et al. (2017). *Revitalisasi kurikulum di Indonesia: Perspektif politik dan pendidikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Monahan, G., & Hengst, J. (2008). *Pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Nir, A. E., & Kafle, D. (2013). *The role of politics in education policy*. International Journal of Educational Development, 33(5), 484-492.
- Noeng Muhadjir. (1993). *Kebijakan pendidikan: Dasar-dasar teori dan praktek*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- OECD. (2018). *Teaching excellence through professional learning and policy reform*. OECD Publishing.
- Tilaar, H. A. (2003). *Pendidikan dalam masyarakat pluralistik: Perspektif dan isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

UNESCO. (2015). *Education for all: Global monitoring report*. Paris: UNESCO Publishing.

Wales, A., et al. (2016). *Politik pendidikan dan perubahan kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.